

Toleransi Antar Suku Bangsa dalam Relasi Kerja: Studi pada Pengusaha Tionghoa dengan Pekerja Melayu di Daerah Kebudayaan Melayu

Qurratul Aini¹, Dian Kurnia Anggreta², Yuhelna³, Nilda Elfemi⁴, Isnaini⁵

^{1,2,4}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas PGRI Sumatera Barat

^{3,5}Program Studi Humanitas, Universitas PGRI Sumatera Barat

e-mail: gurratulaini1706@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas toleransi antara suku bangsa dalam relasi kerja, yang memfokuskan pada pengusaha Tionghoa dengan pekerja Melayu di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa dalam relasi kerja terdistribusi kekuasaan yang besar dimiliki oleh Pengusaha Tionghoa, sebaliknya pekerja suku bangsa Melayu cenderung tidak memiliki power. Dalam relasi tersebut ditelaah toleransi yang dimiliki masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja). Praktik toleransi ditelaah dari persepsi tentang masing-masing suku bangsa, dan aktivitas bersama yang mereka lakukan menunjukkan toleransi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian studi kasus tunggal. Pengumpulan data dilakukan dengan: mewawancarai pengusaha Tionghoa, pekerja Melayu, Pemerintah Lokal, dan Tokoh Adat Melayu; observasi non partisipan; dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi suku bangsa Melayu, melihat Tionghoa sebagai pihak yang komitmen atas aturan, pekerja keras, berani mengembangkan usaha, menghargai keberagaman. Persepsi suku bangsa Tionghoa terhadap suku bangsa Melayu sebagai pihak komunikatif, namun penilaian Tionghoa terhadap pekerja suku bangsa melayu memfokuskan pada karakter personal, sehingga penilaian tidak untuk menggeneralisasikan Suku Bangsa Melayu. Aktivitas menunjukkan toleransi tampak pada perayaan hari besar, seperti dalam kegiatan buka puasa bersama, perayaan imlek dan cap go meh. Praktik ini menunjukkan karakter masyarakat majemuk, bukan asimilasi.

Kata kunci: *Toleransi, Toleransi Antar Suku Bangsa, Relasi Kerja*

Abstract

This article examines ethnic tolerance in the workplace, concentrating on Chinese entrepreneurs and Malay employees in Baran Barat Village, Meral District, Karimun

Regency, Kepulauan Riau Province, Indonesia. This study challenges the notion that in a distributed work relationship, Chinese merchants have a great deal of power, whereas ethnic Malay employees typically have no power. Each party's tolerance is examined in this relationship (employers and employees). The practice of tolerance is examined through the lens of the perceptions of each ethnic group, and the activities they engage in together serve as evidence of tolerance. The research methodology is qualitative, employing the case study research design. Interviews were conducted with Chinese merchants, Malay laborers, local government officials, and Malay traditional leaders; nonparticipant observation and document studies were also employed. In the eyes of the Malay ethnic group, the Chinese are rule-abiding, hard-working, entrepreneurial, and respectful of diversity. The perception of the Chinese ethnic group towards the Malay ethnic group is that of a communicative party; however, the Chinese assessment of Malay ethnic laborers concentrates on personal character, so the assessment is not intended to generalize the Malay ethnic group. Festivities such as breaking the fast together, Chinese New Year celebrations, and cap go meh are examples of activities that demonstrate tolerance. This practice is indicative of a pluralistic society, not assimilation.

Keywords : Tolerance, Tolerance Among Ethnic Groups, Work Relationships

PENDAHULUAN

Negara Multikultural menjadi identitas yang melekat pada Bangsa Indonesia. Data BPS tahun 2010 mencatat bahwa terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Aris et al (2015) juga mencatat ribuan suku bangsa tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan lima belas besar suku bangsa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk adalah: Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, Banten, Banjar, Bali, Aceh, Dayak, Sasak, dan Cina (Aris et al. 2015). Keberagaman suku bangsa, ras, dan agama dapat dilihat sebagai aset besar Bangsa, namun perlu diakui memiliki dualitas. Pada satu sisi, dalam interaksi antar suku bangsa, terwujud integrasi sosial dalam keberagaman. Sebaliknya keragaman yang cenderung besar ini dapat memunculkan tidak stabilan sosial dan politik (seperti potensi konflik sosial) (Aris et al. 2015; Effendi 2015).

Berbagai daerah di Indonesia memiliki representasi masyarakat multikultural, salah satunya Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Daerah ini merupakan daerah kebudayaan Melayu, yang terdapat beragam suku bangsa. Gagasan daerah kebudayaan merupakan konsep yang dikenalkan oleh para Antropolog yang mengklasifikasikan daerah atau wilayah, berdasarkan sebaran suku bangsa paling besar yang memiliki karakteristik suku bangsa tertentu (misal: daerah kebudayaan Jawa meliputi bagian Tengah dan Timur pulau Jawa; daerah kebudayaan Toraja di bagian Utara Sulawesi Selatan) (Novita and Lestari 2021; Rohmah 2020). Data Kelurahan Baran Barat tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa secara berurutan adalah: Melayu

59,42%; Tionghoa 14,88%; Jawa 10,56%; Batak 2,08%; Minangkabau 1,36%; Bugis 0,86%, sisanya suku bangsa lain. Data membuktikan bahwa daerah kebudayaan melayu ini, merupakan salah satu daerah multikultural, yang memerlukan toleransi untuk mengintegrasikan beragam suku bangsa, dengan menerapkan prinsip kemajemukan, bukan memfokuskan pada asimilasi. Jika terjadi asimilasi idealnya terjadi secara organik, tanpa paksaan dari masing-masing suku bangsa, maupun pihak lain.

Studi tentang toleransi antar suku bangsa telah dilakukan oleh para ahli. Berbagai studi seputar toleransi tersebut dalam tulisan ini diklasifikasikan, sebagai berikut: 1) Internalisasi nilai-nilai toleransi untuk generasi muda, pada lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Seperti tulisan: Yulianti dan Dewi (2021) membahas penanaman nilai toleransi dan keberagaman suku bangsa dalam mata pelajaran kewarganegaraan untuk siswa Sekolah Dasar; Sari et al (2020) memfokuskan pada bahan ajar untuk siswa Sekolah Dasar yang memuat nilai-nilai toleransi salam keragaman suku bangsa, agama, dan ras; Marlia et al (2018) memfokuskan pada metode pembelajaran *role playing* digunakan untuk mengajarkan sikap toleransi dan keberagaman; Purwati (2022) juga menyepakati nilai toleransi ditumbuhkan melalui pendidikan; Ma'arif (2019) menjelaskan internalisasi nilai multikultural di lembaga pendidikan (pesantren) dilakukan dengan menumbuhkan kembangkan sikap toleransi antar sesama mahasiswa, dalam berbagai kegiatan kampus. Kelima tulisan tersebut sependapat bahwa dalam lembaga pendidikan (aktor katalisator (seperti: guru/ pengajar), bahan ajar, dan metode pembelajaran), mampu meningkatkan pemahaman, dan penerapan nilai multikultural, menciptakan masyarakat majemuk; 2) Studi toleransi dalam kerangka konseptual, yang menawarkan berbagai solusi memperkuat multikultural dalam keberagaman. Seperti Ginting dan Aryaningrum (2009) menyoroti kecenderungan melemah toleransi, dan menguatnya intoleransi dan konflik, menjadi sinyal bahwa perlu memperkokoh kemajemukan di Indonesia; Firdaus et al (2020) memberikan kerangka pemikiran bahwa internalisasi nilai multikultural diyakini mampu mengantisipasi isu intoleransi di Indonesia, dengan menelaah kesiapan partisipan, berbagai *stakeholder* membantu proses internalisasi, dan dukungan lingkungan tempat generasi muda tumbuh dan berkembang (orang tua, keluarga luas, dan komunitas tempat mereka dibesarkan); Suparlan (2014) mengingatkan bahwa Indonesia memiliki model masyarakat multikultural, yang majemuk dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan ditunjukkan dengan komitmen mulai dari tingkat kebijakan, implementasi, dan dalam relasi kesetaraan; 3) Studi konflik yang menunjukkan lemah toleransi. Seperti: Suparlan (2006) dalam tulisannya membahas primordial sebagai kekuatan memperkokoh integrasi suku bangsa, namun jika terjadi persoalan dengan suku bangsa lain, rentan menimbulkan konflik antar suku bangsa. Ia juga menjelaskan bahwa Negara perlu hadir mengakomodasi atau meredakan perbedaan dan pertentangan antar suku bangsa.

Berbeda dengan studi terdahulu, fokus tulisan ini adalah mengaitkan toleransi dalam relasi kerja (pengusaha dan pekerja). Tulisan ini berangkat dari asumsi awal

bahwa pada daerah kebudayaan tertentu dimungkinkan suku bangsa yang jumlah penduduknya mayoritas memiliki nilai budaya dominan. Seperti pada Masyarakat Sumatera Barat terdapat nilai budaya dominan adalah Minangkabau, serta norma sosial mengacu kepada suku bangsa tersebut, meskipun daerah tersebut terdapat suku bangsa lain, seperti Tionghoa, Nias, Jawa, Sunda, Lampung, Makassar, Batak, Aceh, Palembang, Maluku, dan Papua (Effendi 2015). Relasi kerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah relasi yang terbangun antar aktor dalam perusahaan yang sama. Relasi tersebut bisa terjadi secara vertikal (pengusaha dan pekerja), maupun horizontal (sesama pekerja). Relasi kerja vertikal menunjukkan relasi kuasa yang kuat dimiliki oleh pengusaha, atas pekerja. Kondisi ini tampak dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan Pasal 164-165 (seperti membahas tentang perusahaan memiliki hak menghilangkan relasi kerja pada pekerja jika terjadi *force majeure* atau dalam keadaan memaksa) (Fadilah and Nugroho 2021). Hak perusahaan ini menunjukkan *power* besar pengusaha yang lumrah dalam relasi kerja. Berdasarkan gagasan tersebut pengusaha Tionghoa pada satu sisi memiliki power dalam relasi kerja, namun disisi lain ia tinggal dan berbisnis di daerah kebudayaan Melayu di lokasi penelitian, Baran Barat. Sebaliknya pekerja suku bangsa Melayu, tidak memiliki power dalam relasi kerja, namun tumbuh dan dibesarkan di daerah kebudayaan Melayu. Secara spesifik artikel ini bertujuan: menganalisis toleransi, dengan mengungkap persepsi masing-masing pihak yang memiliki suku bangsa berbeda dalam relasi kerja; dan menganalisis praktik toleransi yang diterapkan oleh pengusaha Tionghoa dengan pekerja Melayu.

METODE

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, menggali pengetahuan dan pengalaman subyek penelitian seputar toleransi antar suku bangsa dalam relasi kerja (Creswell 2007). Tipe penelitian ini adalah studi kasus tunggal, yang mempertimbangkan aksesibilitas data (Yin 2002). Penelitian dilaksanakan pada Januari sampai dengan Februari 2023. Lokasi yang dipilih dalam penelitian yaitu Kelurahan Baran Barat, Kabupaten Karimun, sebagai salah satu daerah kebudayaan Melayu, dengan jumlah penduduk Melayu Melayu 59,42%, urutan penduduk berdasarkan suku bangsa terbanyak berikutnya adalah Tionghoa 14,88%. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive (menentukan kriteria pada masing-masing pengusaha suku bangsa Tionghoa yang memiliki pekerja suku bangsa Melayu, dan kriterian untuk pekerja adalah berasal dari suku bangsa Melayu, sudah bekerja lebih dari 1 tahu, dengan pertimbangan sudah mengenali lingkungan kerja lebih baik), dan snowball (menemukan informan dengan rekomendasi dari informan sebelumnya, sehingga bertemu dengan informan kunci). Praktik memudahkan bertemu informan, seperti diperoleh rekomendasi pemerintah lokal (Ketua Rukun Tetangga/ RT dan Lurah Baran Barat). proses wawancara dilakukan dengan menghubungi calon informan terlebih dahulu, meminta kesediaan, dan menyepakati waktu senggang masing-masing informan, agar proses wawancara tidak mengganggu aktivitas mereka.

Data dianalisis menggunakan spiral analisis data Creswell (2007), menggunakan software NVivo untuk memudahkan pengolahan data kualitatif (Bandur 2019). Proses analisis data diawali dengan mengumpulkan catatan lapangan hasil wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen (seperti profil kelurahan, berita media lokal seputar toleransi antar suku bangsa). Data tersebut dibaca ulang, kodifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan pembahasan persepsi masing-masing informan terhadap suku bangsa lain, dan aktivitas bersama yang mereka lakukan menunjukkan toleransi. Analisis data dilakukan menelaah toleransi dalam relasi kerja, dan menganalisis nilai budaya dominan dalam relasi kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Multikultural di Daerah kebudayaan Melayu Kelurahan Baran Barat

Kelurahan Baran Barat merupakan salah satu dari enam Kelurahan di Kecamatan Meral memiliki keragaman suku bangsa. Sebagian besar penduduk merupakan suku bangsa Melayu (Berjumlah 4.128 Jiwa), sisanya Tionghoa, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, dan suku bangsa lainnya. Berdasarkan catatan Sejarah, daerah ini merupakan daerah kebudayaan Melayu. Pada tahun 1722-1911 seluruh Kepulauan Riau dikuasai oleh dua Kerajaan Melayu yang berdaulat di Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Daik, dan Kerajaan Melayu Riau yang pusat pemerintahannya terletak di Bintan (Yusri 2006). Cerita sejarah tersebut membawa perubahan pada Kerajaan Melayu, yang menjadikan suku bangsa Melayu (salah satu suku bangsa di Indonesia), yang juga disebut suku bangsa lokal di Provinsi Kepulauan Riau (termasuk di Kelurahan Baran Barat).

Kedatangan suku bangsa Tionghoa di Kepulauan Riau terjadi pada dalam rentang tahun 1777-1784. Pada saat itu Kepulauan Riau masih tergabung dalam Provinsi Riau, dan dipimpin oleh Raja Haji. Pada saat itu wilayah ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, mulai dari jumlah penduduk, hingga pertumbuhan perekonomian (terutama sektor perdagangan). Sebagai daerah kaya Sumber Daya Alam, salah satu komoditas yang diperdagangkan adalah gambir. Besarnya permintaan, menuntut peningkatan produktivitas gambir, sehingga membutuhkan tenaga kerja. Migrasi suku bangsa Tionghoa pada awalnya bekerja sebagai buruh pada produksi gambir. Migran suku bangsa Tionghoa tersebut membuat pemukiman di sekitar Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Tepatnya di pulau Penyengat. Hal ini menyebabkan daerah tersebut dikenal dengan Kampung Cina) (Yusri 2006). Kemudian tahun 1830 jumlah suku bangsa Tionghoa di Tanjung Pinang mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 1857 membuat Kota Tanjung Pinang menjadi Kota yang padat penduduk, dan didominasi oleh suku bangsa Tionghoa. Berdasarkan data pada tahun 1906-1910 persentase penduduk Tionghoa di wilayah tersebut sebesar 58,86%. Seiring bertambahnya waktu suku bangsa Tionghoa bermigrasi termasuk ke Kabupaten Karimun.

Kehadiran suku bangsa Tionghoa di Kabupaten Karimun juga berdampak pada Kelurahan Baran Barat (BPS Kecamatan Meral 2021). Kehadiran suku bangsa

Tionghoa memberikan transformasi sektor ekonomi, dengan berkembangnya perdagangan. Suku bangsa Tionghoa dikenal dengan memiliki kemampuan berdagang, membangun, dan mengembangkan berbagai jenis usaha, seperti: restoran, *coffee shop*, jahit pakaian, swalayan, pedagang bangunan, dan lainnya. Kehadiran berbagai jenis usaha ini mendorong terserapnya tenaga kerja lokal (pekerja suku bangsa Melayu, dan tidak menutup kemungkinan juga terbuka untuk suku bangsa lain).

Secara geografis lokasi usaha suku bangsa Tionghoa berdekatan dengan pemukiman mereka, yang menempati daerah pesisir, atau dekat laut. Pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Tionghoa yang menyatakan bahwa dekat keberuntungan. Daerah tersebut kemudian dikenal dengan Kampung Cina. Lokasi dekat laut ini juga memudahkan perdagangan mereka, dan semakin mudah akses perdagangan dengan negara tetangga seperti Malaysia, dan Singapura.

Berbicara relasi kerja, para pengusaha Tionghoa melakukan penerimaan pekerja berdasarkan kebutuhan, dan tidak membedakan suku bangsa. Pada saat penerimaan pekerja hanya dibutuhkan kualifikasi yang dimiliki oleh calon pekerja. Jika kualifikasi belum terpenuhi, namun melihat semangat kerja dari calon, maka pengusaha menerima, kemudian melakukan pelatihan untuk memperkuat kapasitas pekerja baru, agar bisa melaksanakan tugas dengan baik, tanpa kendala.

Persepsi Pekerja Suku Bangsa Melayu kepada Pengusaha Tionghoa dan Sebaliknya

Toleransi antara suku bangsa Melayu dengan Tionghoa tampak dalam interaksi sosial dalam relasi kerja, dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan temuan penelitian, tidak terdapat segregasi antar suku bangsa (termasuk antar Melayu dan Tionghoa). Relasi kerja sama, dan gotong royong tampak menjadi aktivitas lumrah terjadi di lokasi penelitian. Aktivitas bersama yang mereka laksanakan, seperti membersihkan lingkungan, dengan frekuensi dua bulan sekali, menunjukkan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dari berbagai suku bangsa, dan saling bantu menjadi pemandangan integrasi dalam masyarakat. Selama proses penelitian, tidak ditemukan konflik sosial antar suku bangsa tersebut. Toleransi yang sama ditunjukkan dalam relasi kerja, dukungan moril dan materi yang diberikan pengusaha saat pekerja mengalami kesulitan, memberikan ruang dalam melaksanakan ibadah, dan perayaan hari besar masing-masing suku bangsa, merupakan perwujudan tatanan harmonis sebagai ciri masyarakat majemuk.

Menganalisis perspektif pekerja suku bangsa Melayu kepada Pengusaha Tionghoa, begitu pun sebaliknya, menunjukkan penilaian positif. Pekerja Suku Bangsa Melayu menilai pengusaha Tionghoa memiliki semangat kerja keras, pribadi yang transformatif, menghargai keberagaman. Demikian juga dengan pengusaha Tionghoa menilai pekerja suku bangsa Melayu memiliki kemampuan komunikasi, sebuah skill yang dibutuhkan dalam dunia usaha. Persepsi masing-masing pihak tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Persepsi Pekerja Suku Bangsa Melayu dan Pengusaha Tionghoa



Gambar 1. Persepsi Pekerja Suku Bangsa Melayu dan Pengusaha Tionghoa Terhadap Masing-masing Pihak

Pekerja suku bangsa melayu menilai bahwa pengusaha suku bangsa Tionghoa memiliki: 1) Komitmen atas aturan yang telah ditetapkan. Seperti aturan jam kerja, waktu masuk kerja dan pulang tepat waktu, dibuktikan dengan daftar hadir. Aturan tersebut disampaikan pada saat calon pekerja diterima di perusahaan/ usaha yang dikelola. Jika terdapat pekerja melanggar, misalkan selama tiga hari berturut-turut datang terlambat, maka yang bersangkutan diperi peringatan (ditandai dengan Surat Peringatan 1/ SP1). Jika terdapat pelanggaran berikutnya diberi Surat Peringatan II. Batas toleransi pemberian Surat Peringatan 3 kali, jika masih melanggar aturan, pekerja di berhentikan; 2) Pengusaha Tionghoa dinilai oleh pekerja Melayu sebagai pihak yang mau memberi ruang kepada pekerja untuk mengembangkan karier. Seperti terdapat pekerja yang memiliki skill dan softskill, mereka bisa diberikan jabatan, bahkan menjadi orang kepercayaan pengusaha (seperti memamanajemen keuangan perusahaan/ usaha); 3) Pekerja kelas, dilihat dari kemampuan mereka membangun, mengembangkan usaha, dan berani mengambil risiko untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam memajukan usaha. Temuan penelitian pada seluruh informan pengusaha suku bangsa Tionghoa, mereka memiliki jenis usaha lebih dari satu. Seperti: informan A memiliki usaha penyedia bahan bangunan, memiliki restoran, usaha penginapan, dan memiliki CV (*Commanditaire Vennootschap*) dalam penyedia bahan bangunan; kemudian informan B memiliki satu jenis usaha konter handphone, namun memiliki dua cabang; dan informan C memiliki usaha *CoffeeShop* usaha katering, dan bekerja sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah *private*; 4) Pengusaha Tionghoa dinilai toleransi yang tampak pada penghargaan keberagaman suku bangsa, agama, dan ras. Mereka tidak membedakan pekerja berdasarkan suku

bangsa, dan juga tidak memprioritaskan suku bangsa tertentu pada saat penerimaan pekerja baru. Seluruh pekerja mendapatkan perlakuan dengan prinsip kesetaraan. Wujud menghargai keberagaman dengan diberikan ruang kepada pekerja menjalankan ibadah (Bagi pekerja beragama Islam, terdapat ruang Ibadah, dan diberikan kesempatan istirahat guna menjalankan Ibadah). Menyesuaikan waktu (hari dan jam) kerja dengan aktivitas peribadatan, dan pelaksanaan acara-acara adat yang diikuti oleh pekerja suku bangsa Melayu. Misal pada bulan Ramadhan saat pekerja suku bangsa Melayu menjalankan ibadah puasa, jam buka dimundurkan, dan diberikan keleluasaan waktu pada saat berbuka puasa (Jam operasional usaha biasanya mulai 08.00 WIB, dimundurkan menjadi 09.00 WIB. Pada saat mendekati berbuka usaha ditutup jam 17.00 WIB, jika usaha buka hingga malam, maka jam operasional malam dari 18.30 sampai dengan 20.30 WIB, atau menggunakan mekanisme *shift*. Waktu kerja yang menyesuaikan dengan hari besar, tampak pada saat perayaan hari besar Agama Islam, diberikan libur, atau diberikan kelonggaran jam operasional. Pengusaha Tionghoa menghargai perayaan hari besar pekerja Melayu dengan memberi parcel pada saat lebaran Idul Fitri (tidak hanya menunaikan kewajiban memberi Tunjangan Hari Raya yang telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016).

Pengusaha suku bangsa Tionghoa menilai pekerja suku bangsa melayu memiliki: 1) Kemampuan komunikasi yang baik. Tampaknya kemampuan bertutur yang baik dan komunikatif, dilihat sebagai modal sosial yang dapat diimplementasikan dalam bekerja, terutama dalam bekerja pada sektor menghasilkan dan menyediakan produk, dan jasa. Kemampuan pekerja suku bangsa Melayu ini, dilihat nilai menjadi salah satu daya tarik bagi pelanggan; 2) Mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja, dan memiliki semangat pekerja keras. Potensi pekerja ini, diberi apresiasi oleh pengusaha seperti menaikkan jabatan, dan menjadi orang kepercayaan pengusaha. Pekerja suku bangsa Melayu juga menjaga kepercayaan yang telah diberikan, untuk menjaga kredibilitas kerja. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan pekerjaan mereka, dan menghindari persepsi negatif, jika mereka memilih bekerja di tempat lain. Pengusaha Tionghoa terkenal dengan memiliki jejaring dengan pengusaha lain, jika salah satu pekerja mereka memiliki kinerja buruk, memutuskan berhenti, dan mencari pekerjaan di tempat lain, maka informasi tentang pekerja tersebut mudah diketahui oleh pengusaha lain, kondisi ini menyulitkan yang bersangkutan untuk mencari pekerjaan.

Aktivitas Bersama Menunjukkan Toleransi

Aktivitas bersama yang menunjukkan toleransi antar pengusaha Tionghoa dengan pekerja Melayu, tampak pada perayaan berbagai hari besar Agama. Seperti pada saat perayaan hari besar suku bangsa Tionghoa (Imlek atau perayaan tahun baru pada penanggalan masyarakat Tionghoa, yang diakhir dengan Cap Go Meh). Hasil observasi menunjukkan bahwa pada perayaan Imlek 22 Januari 2023, dan Cap Go Meh pada 5 Februari 2023, tampak keterlibatan suku bangsa Melayu dalam perayaan tersebut, seperti membantu memasang lampion, dan hiasan khas Imlek.

Dalam perayaan Imlek suku bangsa Tionghoa melaksanakan Sembahyang Leluhur, menyediakan makanan yang disukai oleh para leluhur. Setelah pelaksanaan Sembahyang, dilanjutkan dengan berkumpul bersama keluarga dan membagikan angpao (amplop yang digunakan untuk menaruh uang, yang akan dibagikan kepada keluarga). Terdapat kepercayaan masyarakat Tionghoa mengenai angpao, bahwa mereka menghindari memberikan nominal angka empat (berkaitan dengan kepercayaan yang menganggap angkat empat simbol kurang beruntung), serta menghindari nomonal ganjil (dimaknai sebagai nominal yang tidak cocok dengan perayaan kegembiraan). Membagikan angpao tidak hanya untuk keluarga, dan sesama suku bangsa Tionghoa, namun juga diberikan oleh pengusaha Tionghoa kepada pekerja (baik suku bangsa Melayu, maupun suku bangsa lainnya). Kemudian partisipasi suku bangsa lain dalam perayaan Imlek adalah terdapat pertunjukan barongsai, yang menarik minat berbagai suku bangsa menyaksikan pertunjukan tersebut. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemain barongsai tidak hanya berasal dari suku bangsa Tionghoa, namun juga berasal dari suku bangsa lainnya (terbuka kesempatan bagi suku bangsa lain mendaftarkan diri, berlatih barongsai hingga menjadi ahli, dan menjadi bagian dalam pertunjukan). Aktivitas ini menunjukkan toleransi, dan partisipasi suku bangsa lain dalam perayaan hari besar di luar kebudayaan mereka.

Pada saat menyambut bulan Ramadhan, suku bangsa Tionghoa turut membantu pemasangan lampu hias, bahkan turut membantu secara material (memberikan sumbangan untuk mesjid), merupakan wujud toleransi dan integrasi antar suku bangsa. Dalam relasi kerja, pengusaha juga menyediakan waktu untuk melaksanakan buka puasa bersama dengan rekan kerja dan pengusaha. Biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan buka puasa bersama tersebut ditanggung oleh pengusaha Tionghoa. Pada saat perayaan Idul Fitri, pengusaha juga menyediakan parsel untuk karyawan. Momen Idul Fitri juga menjadi momentum silaturahmi, dan pengusaha Tionghoa memberikan kelonggaran waktu untuk mudik. Jika jenis usaha cenderung ramai pada libur lebaran, diterapkan mekanisme shift, dengan koordinasi yang jelas sebelum libur dimulai. Berdasarkan aktivitas bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing suku bangsa, menunjukkan bahwa dalam relasi kerja juga terbangun toleransi, yang mencerminkan mutikultural, pengusaha Tionghoa dalam relasi kerja vertikal yang memiliki power, tidak mendominasi dan memberi ruang pada tumbuhnya keragaman, namun dalam integrasi. Meskipun terdapat aktivitas bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing suku bangsa dalam relasi kerja, tidak tampak nilai budaya dominan yang menonjol selama penelitian.

SIMPULAN

Pekerja suku bangsa Melayu dan pengusaha Tionghoa dalam relasi kerja dalam temuan penelitian memiliki karakteristik masyarakat majemuk. Masing-masing pihak meskipun dalam relasi kerja vertikal, tetap hidup berdampingan dalam identitas budaya masing-masing. Melayu sebagai suku bangsa yang cenderung dekat dengan

ajaran Agama Islam, serta suku bangsa Tionghoa cenderung dekat dengan ajaran Agama Buddha, Konghucu, dapat berdampingan, dan mempertahankan identitas masing-masing, menunjukkan karakteristik masyarakat majemuk. Meskipun terdapat kegiatan yang dilakukan bersama, tampak tidak terjadi dominasi nilai kebudayaan dari pihak mana pun. Penelitian ini memiliki kelemahan dalam menelaah asimilasi sosial yang dimungkinkan terjadi secara organik dalam hubungan antar suku bangsa dan relasi kerja vertikal ini. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, dapat menelaah asimilasi sosial yang terjadi dalam interaksi antar suku bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada informan yang telah meluangkan waktu, berbagai informasi, dan pengalaman selama proses pengumpulan data. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Lokal, dan Tokoh Adat yang telah memfasilitas, memberikan informasi, dan mengenalkan kepada informan penelitian. Terima kasih kepada Universitas PGRI Sumatera Barat telah memfasilitasi tersedia literatur, dan menunjang proses pelaksanaan riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Ananta;, Evi Nurvidya; Arifin, M. Sairi; Hasbullah, Nur Budi; Handayani, and Agus; Pramono. 2015. *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Singapore: ISEAS Institute of Southeast Asian Studies Singapore.
- Bandur, Agustinus. 2019. *Penelitian Kualitatif Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan NVivo 12 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. Second Edi. edited by L. C. Shaw, K. Greene, D. Santoyo, and J. Robinson. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Effendi, Nursyirwan. 2015. 'Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan Dari Kemajemukan Budaya Di Sumatera Barat'. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 16(2):107–15. doi: 10.25077/jantro.v16i2.27.
- Fadilah, Khalda, and Andriyanto Adhi Nugroho. 2021. 'Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan'. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8(1):334–50.
- Firdaus, Dian Kurnia Anggreta, and Faishal Yasin. 2020. 'Internalizing Multiculturalism Values Through Education: Anticipatory Strategies for Multikultural Problems and Intolerance in Indonesia'. 22(01):131–41.
- Ginting, Rosalina, and Kiki Aryaningrum. 2009. 'Toleransi Dalam Masyarakat Plural'. *Jurnal Ilmiah Majalah Lontar* 23(4):1–7.
- Ma'arif, Muhammad Anas. 2019. 'Internalisasi Nilai Multikultural Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi (Studi Di Di Pesantren Mahasiswa Universitas Islam Malang)'. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 2(1):164–89. doi: 10.31538/nzh.v2i1.179.
- Marlia, Seli, Aji Fauziana Ridwan, and Asep Priatna. 2018. 'Penerapan Metode

- Pembelajaran Role Playing Untuk Meningkatkan Sikap Toleransi Keragaman Suku Bangsa Dan Budaya Kelas V'. *Didaktik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 4(2):186–211. doi: 10.36989/didaktik.v4i2.72.
- Novita, Indry Ayu, and Wahyu Lestari. 2021. 'Eksistensi Tari Manimbong Dalam Upacara Rambu Tuka' Masyarakat Toraja'. *JPKS: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni* 6(1):61–69.
- Purwati, Dede Darisman, and Aiman Faiz. 2022. 'Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi Dalam Praksis Pendidikan'. *Jurnal Basicedu* 6(3):3729–35.
- Rohmah, Kristiana Rizqi. 2020. 'Wujud Kebudayaan Jawa Dalam Bentuk Rumah Limasan'. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26(02):388–405. doi: 10.30631/nazharat.v26i02.35.
- Sari, Mia Zultrianti, Yani Fitriyani, and Dwi Amalia. 2020. 'Analisis Bahan Ajar Keragaman Suku Bangsa Dan Budaya Dalam Implementasi Karakter Toleransi Di Sekolah Dasar'. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* 6(3):382–96. doi: 10.33394/jk.v6i3.2824.
- Suparlan, Parsudi. 2006. 'Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya'. *Antropologi Indonesia* 30(2):138–50. doi: 10.7454/ai.v30i2.3559.
- Suparlan, Parsudi. 2014. 'Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa Atau Kebudayaan?' *Antropologi Indonesia* 0(72):24–37. doi: 10.7454/ai.v0i72.3472.
- Yin, Robert K. 2002. *Case Study Research Design and Methods*. Third. United States of America.
- Yulianti, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. 'Penanaman Nilai Toleransi Dan Keberagaman Suku Bangsa Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Kewarganegaraan'. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2(1):60–70.
- Yusri, Ali. 2006. 'Sejarah Dan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Riau'.